



**PENERAPAN ASPEK PEMERINTAHAN MILIK RAKYAT DAN  
PEMERINTAHAN MENGACU PADA PASAR DALAM KONSEP *REINVENTING  
GOVERNMENT* DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
PANGANDARAN**

Mita Fatari Ramadhani

Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[mitafatari04@gmail.com](mailto:mitafatari04@gmail.com)

Faizal Pikri

Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[faizalpike@uinsgd.ac.id](mailto:faizalpike@uinsgd.ac.id)

Idah Wahidah

Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[iddah@uinsgd.ac.id](mailto:iddah@uinsgd.ac.id)

**Abstrak**

*Pada Tahun 2020 Kabupaten Pangandaran berhasil menduduki peringkat pertama sebagai daerah wisata di Jawa Barat di antara kabupaten/kota lainnya yang banyak dikunjungi pengunjung lokal. Kabupaten Pangandaran memiliki penduduk yang dinamis dan kompleks akan tetapi pemanfaatan dan pemberdayaan potensi alam, budaya maupun manusianya kurang optimal. Objek wisata pantai di Kabupaten Pangandaran mendominasi pilihan destinasi wisata sehingga objek wisata lainnya seperti desa wisata, wisata kuliner, cagar alam, dan wisata alam tidak terlalu dikenal oleh publik terutama oleh masyarakat di luar Kabupaten Pangandaran. Padahal, destinasi wisata selain objek wisata pantai di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang tidak kalah besar. Selain itu para pelaku usaha jasa pariwisata dan media massa yang masih belum cukup optimal untuk membentuk citra kepariwisataan di kabupaten Pangandaran, Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan aspek Pemerintahan Milik Rakyat Dan Aspek Pemerintahan Mengacu Pada Pasar Dalam Konsep Reinventing government Di Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan aspek pemerintahan milik rakyat dan aspek pemerintahan mengacu pada pasar sudah diterapkan dengan baik namun belum masih optimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program-program yang diadakan oleh pihak Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran.*

*Kata Kunci: Masyarakat, Pariwisata, Reinventing Government*

**Abstract**

*In 2020 Pangandaran Regency managed to rank first as a tourist area in West Java among other regencies/cities visited by many local visitors. Pangandaran Regency has a dynamic and complex population, but the utilization and empowerment of natural, cultural and human potentials is not optimal. Beach tourism objects in Pangandaran Regency dominate the choice of tourist destinations so that other tourist objects such as tourist villages, culinary tours, nature reserves, and nature tourism are not well known to the public, especially by people outside Pangandaran Regency. In fact, tourist destinations other than beach attractions in Pangandaran Regency have no less great potential. In addition, tourism service business actors and mass media are still not optimal enough to form the image of tourism in Pangandaran district, thus this research aims to find out how to apply aspects of People-Owned Government and Aspects*

*of Government Referring to the Market in the Concept of Reinventing government in the Tourism and Tourism Office. Pangandaran Regency culture. The method used in this research is descriptive qualitative research method, with the determination of the sample using purposive sampling technique. The results of this study are the implementation of the aspects of government owned by the people and aspects of government referring to the market that have been implemented well but are not still optimal because there are still many people who do not know the programs held by the Tourism and Culture Office of Pangandaran Regency.*

*Keywords: Reinventing Government , Society, Tourism*

## PENDAHULUAN

Menurut Blau dan Meyer konsep *New Public Management* (NPM) ialah isu krusial dalam reformasi sektor publik. Konsep NPM juga mempunyai hubungan dengan persoalan manajemen kinerja sektor publik sebab penilaian kinerja menjadi salah satu prinsip utama dari NPM. Perselisihan yang terjadi mengenai kinerja dalam administrasi publik ditunjukkan dengan adanya ketidakpuasan. Kecondongan birokrasi dan birokratisasi di tengah masyarakat modern terlihat menyedihkan, sehingga menggambarkan adanya pandangan tentang perkembangan praktek birokrasi yang tidak rasional dan dianggap sebagai kabar yang tidak menggembirakan. Dari banyaknya permasalahan yang timbul dalam birokrasi, konsep *New Public Management* dinilai bisa menciptakan perubahan guna membangunkan organisasi publik yang hiatus dan juga melayani dirinya sendiri dengan inovasi dari *private sector*.<sup>1</sup>

*Reinventing government* adalah transformasi sistem serta organisasi pemerintah secara mendasar dalam mengekskansi efektivitas, efisiensi, ataupun kapabilitas lembaga pemerintah dalam menciptakan ide-ide baru. Transformasi ini diraih melalui diubahnya sasaran, remunerasi, akuntabilitas dan transparansi, formasi kekuasaan serta budaya, sistem, dan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain, *reinventing government* merupakan upaya pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya melalui optimalisasi berbagai pelayanan dalam sektor publik. Dengan diterapkannya *reinventing government* dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Konsep *reinventing government* serta *new public management* umumnya saling menekankan pada seperti apa “membisniskan birokrasi” yang lebih mengacu pada timbal balik agar lebih tepat serta berdaya guna. Ada 7 (tujuh) prinsip NPM yang tersusun atas: profesionalitas dalam pengelolaan sektor publik, standar serta tolak ukur yang jelas terkait kinerja, atensi lebih pada kontrol timbal balik, pemisahan unit-unit kerja (*disaggregation unit*) dalam organisasi sektor publik, reformasi menuju ekspansi kompetensi sektor publik, mengangkat ragam pengelolaan swasta pada sektor publik, serta lebih disiplin juga ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dedy Setiono, “Analisis Penerapan New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Balai Kesehatan/Rumah Sakit,” *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi* 3, no. 2 (2019).

<sup>2</sup> Mohammad Akbar, “Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management dan Governance dalam

Kedua konsep yang sudah dipaparkan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung sudah membagikan gagasan bagi perubahan sektor publik di Indonesia. Meskipun NPM dan *reinventing government* tidak dengan rinci diselenggarakan di Indonesia, tetapi hal tersebut telah menginspirasi perubahan manajemen sektor publik dari yang sebelumnya kepada transformasi yang lebih modern.

Di Indonesia sektor yang mendominasi untuk ditingkatkan dewasa ini yaitu bidang pariwisata. Ekspansi bidang pariwisata di Indonesia sekarang ini menggambarkan fungsi dalam pembangunan perekonomian nasional, pariwisata juga seringkali digambarkan sebagai respon atas berbagai permasalahan yang ditemui di Indonesia, diantaranya membuka lapangan pekerjaan serta banyak potensi ekonomi, memelihara serta mereparasi lingkungan, juga mendukung perekonomian regional. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan segera meluncurkan beberapa program yang ditujukan untuk mendukung terlaksananya konsep *reinventing government* di antaranya adalah Kampanye Sadar Wisata, Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Pemasaran *Online* serta Peningkatan Kualitas Layanan bagi usaha lokal di sektor pariwisata. Selain itu, pada tahun 2021 Kemenparekraf telah menyelenggarakan program Desa Wisata Indonesia 2021.<sup>3</sup>

Dalam program tersebut, Kabupaten Pangandaran meraih peringkat ke-IV dengan kategori Desa Wisata Maju. Kabupaten Pangandaran merupakan satu dari banyaknya daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai beragam peluang pariwisata. Pada tahun 2020 Kabupaten Pangandaran berhasil menduduki peringkat pertama sebagai daerah wisata di Jawa Barat di antara kabupaten/kota lainnya yang banyak dikunjungi pengunjung lokal. Sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran menjadi sektor penting yang menyumbang pendapatan daerah. Dalam hal ini peluang-peluang yang dimiliki di wilayah yang berkaitan dengan pariwisata yang tujuannya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.<sup>4</sup> Dalam memaksimalkan sektor pariwisata tersebut Kabupaten Pangandaran menerapkan kebijakan tersendiri sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Optimalisasi sektor pariwisata tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Penyelenggaraan kepariwisataan meliputi: a. Pengembangan produk pariwisata; b. Pemasaran destinasi pariwisata; c. Usaha kawasan pariwisata; d. Usaha jasa transportasi wisata; e. Usaha jasa

---

Reformasi Administrasi,” *Reformasi* 5, no. 2 (2015).

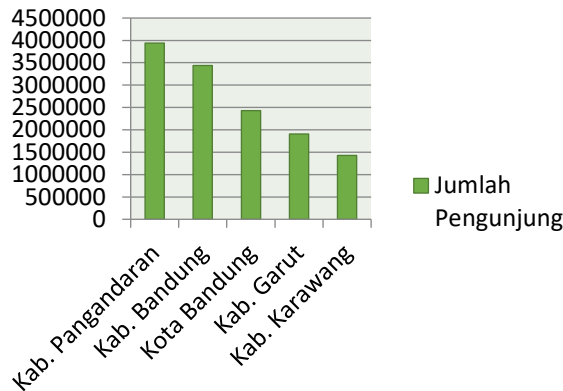
<sup>3</sup> I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, “Siaran Pers: Kemenparekraf Luncurkan Kampanye Sadar Wisata dan Pengembangan Pemasaran Online di 6 Destinasi Prioritas,” <https://kemenparekraf.go.id/>, 2022.

<sup>4</sup> Ismuhadi Heru Wijayanto, Agus Suryono, dan Sukanto, “Pengembangan Potensi Pariwisata dalam Perspektif Reinventing Government (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan),” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2013).

perjalanan pariwisata; f. Usaha jasa makanan dan minuman; g. Penyediaan akomodasi; h. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; i. Usaha jasa informasi pariwisata; j. Usaha jasa pramuwisata; k. Usaha daya tarik wisata; dan l. Usaha wisata tirta.”

### Diagram 1

#### Jumlah Pengunjung Lokal ke Objek Wisata di Jawa Barat Tahun 2020



Sumber : *Open Data Jabar (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2021)*, diolah oleh peneliti

Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Pangandaran memiliki total pengunjung lokal terbanyak dengan jumlah 3.939.992 orang.<sup>5</sup> Selain itu, Kabupaten Bandung menduduki posisi kedua dengan total pengunjung lokal yang berjumlah 3.440.529 orang. Selanjutnya Kota Bandung menyusul dengan total pengunjung lokal yang berjumlah 2.431.290 orang menduduki posisi ketiga setelah Kabupaten Bandung. Kabupaten Garut berada di posisi keempat dengan total pengunjung lokal yang berjumlah 1.907.007 orang. Serta posisi kelima diduduki oleh Kabupaten Karawang dengan total pengunjung lokal yang berjumlah 1.426.983 orang.<sup>6</sup>

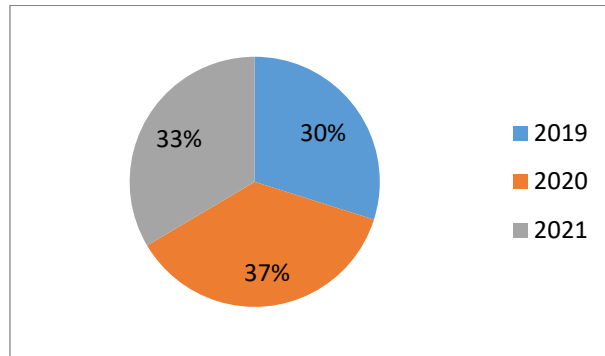
Jika dilihat dari 2019-2020 jumlah pengunjung ke wisata Pangandaran bertambah angkanya, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 seperti dalam diagram di bawah ini :

### Diagram 2

#### Jumlah Pengunjung Lokal Ke Objek Wisata di Kabupaten Pangandaran

<sup>5</sup> Akbar, “Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management dan Governance dalam Reformasi Administrasi.”

<sup>6</sup> Dinas Pariwisata dan kebudayaan Provinsi Jawa Barat, “Jumlah Pengunjung ke Objek Wisata Berdasarkan Jenis Wisatawan di Jawa Barat,” Open Data Jabar, 2021.



Sumber : Open Data Jabar (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2021), diolah oleh peneliti

Jumlah pengunjung lokal yang mengunjungi objek wisata di Kabupaten Pangandaran mengalami fluktuasi. Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, pengunjung lokal yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten pangandaran mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun 2019 yaitu sebanyak 3.939.992 pengunjung. Namun, pada tahun 2021 jumlah pengunjung lokal yang mengunjungi objek wisata di Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan sebesar 4% yaitu sebanyak 3.604.113 pengunjung. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 Kabupaten Pangandaran sempat mengalami penutupan objek wisata.

Kabupaten pangandaran memiliki berbagai macam destinasi wisata, di antaranya objek wisata pantai, cagar budaya, wisata kuliner, wisata alam dan desa wisata. Pada dasarnya, Kabupaten Pangandaran memiliki penduduk yang dinamis dan kompleks akan tetapi dalam pemanfaatan dan pemberdayaan potensi alam, budaya maupun sumber daya manusianya kurang optimal. Selain itu para pelaku usaha jasa pariwisata dan media massa masih belum cukup maksimal untuk membentuk citra kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Hal ini sangat disayangkan, mengingat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran utamanya dalam sektor pariwisata sangat tinggi.

Dalam sketsa *reinventing government* pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu menyelenggarakan berbagai pembaruan yang substansial dalam mengekspansi pariwisatanya. *Reinventing government* merupakan aneka upaya yang diselenggarakan oleh aparat birokrasi dalam memotivasi adanya pembaruan sektor publik yang diorientasikan pada 10 (sepuluh) kaidah yang dipaparkan oleh Osborne dan Gaebler, yaitu :

- a) Pemerintahan katalis yaitu membimbing daripada menarik, artinya pemerintah selaku pihak yang membuat kebijakan perlu menjadi pembimbing daripada penyelenggara;
- b) Pemerintahan milik rakyat yaitu menyerahkan kuasa daripada menyediakan pelayanan, artinya pemerintah harus lebih memanfaatkan publik daripada selalu melayani;
- c) Pemerintahan yang bersaing yaitu memancing kompetisi ke dalam penyediaan jasa, artinya pemerintah perlu memancing gairah kompetisi dalam mengekspansi diri;

- d) Pemerintahan yang diselenggarakan oleh sasaran yaitu merestrukturisasi lembaga yang diselenggarakan oleh kebijakan;
- e) Pemerintahan yang berlandaskan hasil yaitu mendanai hasil, bukan pendapatan;
- f) Pemerintahan berorientasi konsumen yaitu melengkapi keperluan konsumen, bukan birokrat;
- g) Pemerintahan bisnis yaitu menciptakan daripada melakukan pembelajaran;
- h) Pemerintahan antisipatif yaitu meminimalisir terjadinya masalah daripada memperbaiki;
- i) Pemerintahan desentralisasi yaitu dari tingkatan pada keikutsertaan serta kelompok kerja;
- j) Pemerintahan mengacu pada pasar yaitu mendorong reformasi lewat pasar.<sup>7</sup>

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari peneliti adalah penelitian yang berjudul “Pengembangan Potensi Pariwisata Dalam Perspektif *Reinventing Government* (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lamongan)”.<sup>8</sup> Temuan dari penelitian tersebut yaitu ketepatan antara penyelenggaraan paradigma *reinventing government* terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan mencapai angka sekitar 80%. Angka tersebut didapatkan dari hasil premis dari penjumlahan 10 (sepuluh) kaidah yang menjadi bagian dalam *Reinventing Government*, Disbudpar Kabupaten Lamongan memenuhi 8 (delapan) kaidah, sedangkan dua kaidah lainnya belum terpenuhi. Selain penelitian tersebut, penelitian yang menjadi referensi selanjutnya yaitu penelitian berjudul “Penerapan *Reinventing Government* (Mewirauahakan Birokrasi) di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”.<sup>9</sup> Temuan dari penelitian ini yaitu implementasi *reinventing government* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pelaksanaannya terbilang belum optimal serta berkesinambungan. Dari seluruh prinsip *reinventing government*, ditemukan hanya 3 (tiga) prinsip yang sudah dengan tepat diselenggarakan yaitu prinsip yang mengacu pada hasil, pemerintahan yang mempertimbangkan resiko, serta pemerintahan desentralisasi.

Kemudian penelitian terdahulu lainnya yaitu “Tinjauan Regulasi Tol Laut Berdasarkan Teori *Reinventing Government* (*Sea Toll Regulation Review Based On Reinventing Government Theory*)”.<sup>10</sup> Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Tol Laut telah mengimplementasikan sebagian besar kaidah-kaidah *reinventing government* tetapi masih adanya interaksi antar konsepsi peraturan dengan misi. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dijadikan referensi lainnya yaitu

---

<sup>7</sup> David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirauahakan Birokrasi : Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996).

<sup>8</sup> Wijayanto, Suryono, dan Sukanto, “Pengembangan Potensi Pariwisata dalam Perspektif *Reinventing Government* (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan).”

<sup>9</sup> Siren dan Irwan Sinaga, “Penerapan *Reinventing Government* (Mewirauahakan Birokrasi) di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,” *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2017).

<sup>10</sup> Ali Mashuda, Taufik Ade Irawan, dan Ridha Nurul Ihsan, “Tinjauan Regulasi Tol Laut Berdasarkan Teori *Reinventing Government* (*Sea Toll Regulation Review Based on Reinventing Government Theory*),” *Rechts Vinding* 8, no. 2 (2019).

Mita Fatari Ramadhani, Faizal Pikri, Idah Wahidah : Penerapan Aspek Pemerintahan Milik Rakyat Dan Pemerintahan Mengacu Pada Pasar Dalam Konsep *Reinventing Government* Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

“Aplikasi Konsep *Reinventing Government, Good Governance Dan New Public Service* Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung”.<sup>11</sup> Hasil kajian penerapan prinsip bahwa *reinventing government* yang diterapkan namun belum seluruhnya sesuai yaitu prinsip *Competitive government*, prinsip tersebut senada dengan prinsip efektivitas dan efisiensi bantuan, *accountability* dan *professionalism* dalam *good governance*. Kemudian prinsip *reinventing government* yang diterapkan namun salah dalam penerapannya adalah prinsip *enterprising government*, sejalan dengan prinsip profesionalisme, efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas dalam *good governance*. Serta Penerapan *reinventing government* yang tidak dapat dilaksanakan adalah prinsip *market oriented government*.

Berbekal dari penelitian-penelitian tersebut, peneliti ingin mengkaji terkait penerapan aspek pemerintahan milik rakyat dan pemerintahan mengacu pada pasar dalam konsep *reinventing government* di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas terletak pada topik yang dikaji yaitu terkait konsep *reinventing government*. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas, seperti fokus penelitian ini yang terletak pada aspek pemerintahan milik rakyat dan pemerintahan mengacu pada pasar. Kemudian, penelitian ini berpusat pada dua prinsip dari *reinventing government* yaitu pemerintahan milik rakyat dan pemerintahan mengacu pada pasar. Selain itu, Lokus penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, bahkan tidak banyak diteliti oleh peneliti lainnya terutama dengan topik konsep *reinventing government*. Lokus penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Penerapan aspek pemerintahan milik rakyat dan pemerintahan mengacu pada pasar dalam konsep *reinventing government* ini sejalan dengan Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025 Pasal 1 ayat 13 yang berbunyi “Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi yang meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata” serta Pasal 1 ayat 17 yang berbunyi “Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.” Dimana dalam pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa masyarakat termasuk

---

<sup>11</sup> Yadi Lustiadi, “Aplikasi Konsep *Reinventing Government, Good Governance dan New Public Service* dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung,” *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2016).

kedalam kelembagaan kepariwisataan yang menjalankan roda pariwisata di Kabupaten Pangandaran, yang berarti bukan hanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saja yang mengelola bidang pariwisata tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 17 menyatakan bidang pariwisata memerlukan pemasaran untuk menyampaikan produk wisatanya, dalam hal ini pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran membuat *web* dan akun *Instagram* guna mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat mencoba menelaah penerapan aspek pemerintahan milik rakyat dan aspek pemerintahan mengacu pada pasar dalam konsep *reinventing government* di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Inti esensial dari konsep *reinventing government* yaitu seperti apa tata laksana memprivatisasi birokrasi sehingga sektor publik bisa menyelenggarakan sistem organisasinya agar lebih bersaing serta tepat dan berdaya guna. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti terdorong untuk menjadikan topik tersebut sebagai sebuah penelitian yang berjudul Penerapan Aspek Pemerintahan Milik Rakyat Dan Aspek Pemerintahan Mengacu Pada Pasar dalam Konsep *Reinventing Government* Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Adapun temuan permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan Bagaimanakah Penerapan Aspek Pemerintahan Milik Rakyat Dan Aspek Pemerintahan Mengacu Pada Pasar Dalam Konsep *Reinventing Government* Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran? Penelitian ini bertujuan guna memahami bagaimana penerapan aspek Pemerintahan Milik Rakyat Dan Aspek Pemerintahan Mengacu Pada Pasar Dalam Konsep *Reinventing government* Di Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan roda pemerintahannya.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif.<sup>12</sup> Alasan penggunaan metode penelitian tersebut yaitu karena peneliti ingin memperoleh jawaban dari pertanyaan “bagaimana” sehingga hasil yang didapatkan akan lebih rinci berdasarkan dengan masalah yang ada di lapangan. Peneliti melangsungkan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Sumber data yang didapat peneliti yakni sumber data primer serta sumber data sekunder, sumber data primer diperoleh lewat wawancara serta observasi secara langsung di lapangan sedangkan data sekunder didapat melalui sumber pemberitaan media massa elektronik dan jurnal/ artikel dan dokumen-dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi, untuk penentuan sample, peneliti

---

<sup>12</sup> Sahya Anggara, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015).



memilih teknik purposive sampling yang dimana informan kuncinya yaitu Kasubbag Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti yaitu teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Kabupaten Pangandaran adalah bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai destinasi wisata yang bervariasi, seperti wisata alam, budaya, buatan serta macam-macam kuliner asli Pangandaran. Wajar apabila Kabupaten Pangandaran memegang peringkat tertinggi, karena kawasan wisata tersebut telah diketahui sejak lama sebagai wisata alam dengan objek pantai. Sampai kini, arah ekspansi wisatanya meluas dengan memberikan objek-objek wisata baru. Bidang pariwisata menjadi aspek prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang lahir pada Tahun 2013.<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (7), Pariwisata yaitu “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Kabupaten Pangandaran diketahui dijadikan sebagai daerah target wisata pantai prioritas di Jawa Barat bahkan Jakarta dan Jawa Tengah sisi barat. Kabupaten Pangandaran tersusun atas 10 kecamatan dengan 93 Desa. Total desa ini terbilang paling rendah jika dikomparasikan dengan kabupaten /kota lainnya di Jawa Barat.

Destinasi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran di antaranya adalah Objek wisata pantai, cagar alam, wisata kuliner, wisata alam dan desa wisata. Di antara destinasi-destinasi wisata tersebut, sebagian besar pengelolaan wisata dikelola desa. Dalam konsep *reinventing government*, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana tetapi juga sebagai pengarah dimana pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat memberdayakan masyarakat dalam optimalisasi sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Destinasi wisata yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yaitu Objek Wisata Pantai Karapyak, Objek Wisata Pantai Pangandaran, Objek Wisata Pantai Batu Hiu, Objek Wisata

---

<sup>13</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).

<sup>14</sup> Anang Muftiadi, “Pengembangan Desa Wisata dan Potensinya di Kabupaten Pangandaran,” *Jurnal AdBispreneur* 2, no. 2 (2017).

Pantai Batukaras, dan Objek Wisata Green Canyon.

Dalam mengkaji penerapan konsep *reinventing government* di Kabupaten Pangandaran, peneliti menggunakan teori prinsip-prinsip *reinventing government* yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler. Akan tetapi, peneliti hanya mengkaji dua aspek dari teori tersebut di antaranya aspek pemerintahan milik rakyat dan aspek pemerintahan mengacu pada pasar. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Aspek Pemerintahan Milik Rakyat**

Dalam aspek pemerintahan milik rakyat, peranan pemerintah yaitu mendayagunakan masyarakat dalam pelaksanaan beragam keperluan publik, agar terwujud rasa memiliki bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan pemerintah tidak lagi berperan selaku pemberi layanan tetapi hanya sekedar pemberi arahan.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut, dalam aspek ini masyarakat dijadikan sebagai aktor utama dalam pengelolaannya. Kabupaten Pangandaran juga menerapkan aspek ini, dalam pelaksanaannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran memberdayakan masyarakat di Kabupaten Pangandaran utamanya dalam pengembangan destinasi wisata. Bentuk penerapan dari aspek ini adalah diserahkan pengelolaan objek wisata pantai, desa wisata dan wisata alam kepada pemuda setempat yang berdomisili pada objek wisata tersebut.

Dari aspek pemerintahan milik rakyat dalam konsep *reinventing government*, Kasubbag Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran menuturkan bahwa ada beberapa kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat secara langsung seperti program kegiatan pelatihan pemandu per-obyek wisata dan juga pembinaan kepada desa-desa untuk membentuk desa wisata yang bermanfaat dan lebih memperkenalkan desa mereka ke dunia luar sehingga dapat lebih mudah dikenal oleh para pengunjung juga demi memajukan daerah mereka itu sendiri. Program pembentukan desa wisata tersebut mendapat respon positif dari sebagian masyarakat di beberapa desa dengan dibentuknya desa wisata. Desa wisata yang sudah terbentuk di antaranya adalah Desa Wisata Selasari Kecamatan Parigi, Desa Wisata Kertayasa Cijulang, dan Desa Wisata Cisangkal di Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar. Selain pengelolaan desa wisata, ada juga objek wisata lain yang pengelolaannya dilakukan oleh para pemuda desa, di antaranya adalah Objek Wisata Ciwayang, Objek Wisata Citumang, Objek Wisata Curug Jojogan, dan Objek Wisata Curug Bojong.

---

<sup>15</sup> Osborne dan Gaebler, *Mewirauahakan Birokrasi : Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*.

### **Desa Wisata Selasari**



### **Pantai Madasari**



*Sumber : jadesta.kememparekrif (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021) Potret Desa Wisata Selasari, Kabupaten Pangandaran-Jawa Barat*

*Sumber : kadinpangandaran.or.id (KADIN Kabupaten Pangandaran, 2020) Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran-Jawa Barat*

### **Gambar 1**

### **Gambar 2**

Kedua gambar tersebut merupakan dokumentasi dari Desa Wisata Selasari dan Pantai Madasari. Di mana kedua objek wisata tersebut merupakan objek wisata yang pengelolaannya diserahkan pada pemuda atau warga setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah menerapkan aspek pemerintahan milik rakyat. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran memberikan arahan pada masyarakat yang mengelola objek wisata tersebut.

Meskipun aspek pemerintahan milik rakyat secara umum telah diterapkan, namun masih terdapat masyarakat yang belum paham terkait konsep tersebut. Beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan yang menjadi destinasi wisata belum paham tentang tanggung jawab mereka dalam pengelolaan destinasi tersebut. Sehingga, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran selaku pendorong terbentuknya desa wisata dan objek wisata tersebut harus senantiasa memberi perhatian serta merevitalisasi berbagai bentuk pembinaan sebagai upaya mewujudkan aspek pemerintahan milik rakyat.

Berbeda dengan pemaparan di atas, menurut Kasubbag Umum Disparbud Kab. Pangandaran, program aktivitas yang menjadi unggulan untuk menarik daya tarik pengunjung yaitu objek wisata pantainya, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun oleh desa-desa dan juga pihak lainnya. Hal ini terlihat dari popularitas objek wisata pantai terutama Pantai Pangandaran yang menjadi destinasi pilihan menjelang libur panjang. Padahal, Kabupaten Pangandaran masih memiliki destinasi wisata lainnya. Meskipun begitu, terdapat juga objek wisata pantai yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung contohnya Pantai Madasari, dan Pantai Keusikluhur. Dalam memaksimalkan penerapan aspek pemerintahan

Mita Fatari Ramadhani, Faizal Pikri, Idah Wahidah : Penerapan Aspek Pemerintahan Milik Rakyat Dan Pemerintahan Mengacu Pada Pasar Dalam Konsep *Reinventing Government* Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

milik rakyat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mengukung program pembinaan dan pelatihan untuk mengarahkan masyarakat terkait pengelolaan destinasi wisata.

## B. Pemerintahan Mengacu Pada Pasar

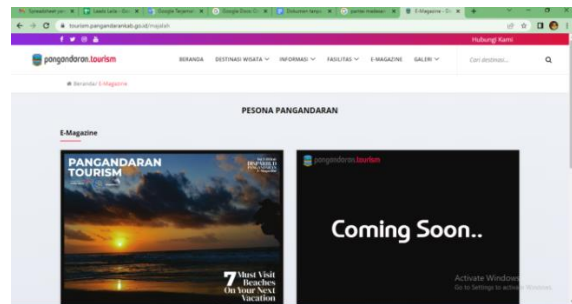
Dalam aspek pemerintahan mengacu pada pasar, hal ini berarti bahwa dalam proses pelaksanaan pelayanannya pemerintah harus beradaptasi terhadap perkembangan pasar bukan hanya bergelut pada berbagai program kerja yang konstan, sebab umumnya ditujukan pada komponen saja, tidak tepat sasaran, terfragmentasi, juga bukan berupa tindakan yang mengoreksi namun cenderung mengarah pada situasi monoton sebagai dampak dari kecilnya transfigurasi yang signifikan.<sup>16</sup>

### Akun Instagram Disparbud dan Website pangandarantourism.go.id dan Influencer E-Magazine



Gambar 3

Sumber : Akun Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten pangandaran, Akun Instagram salah satu influencer Pangandaran sebagai bentuk promosi melalui media social



Gambar 4

Sumber : Website pangandarantourism.go.id dan fitur E- Magazine

Dari aspek pemerintahan mengacu pada pasar dalam konsep *reinventing government*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berkolaborasi dengan pihak swasta baik dalam bidang promosi maupun perjalanan. Untuk promosi, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran memperkenalkan pariwisata Pangandaran melalui *channel youtube* para *youtuber* dan *Instagram* para *influencer* juga akun *Instagram* dan *web* milik Disparbud itu sendiri melalui kanal pangandarantourism.go.id. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Pangandaran mencoba beradaptasi terhadap pasar melalui promosi digital. Selain memiliki web informasi tentang pariwisata, dalam web tersebut Kabupaten Pangandaran

<sup>16</sup> Osborne dan Gaebler.

menyediakan *E-Magazine* yang berisi pilihan destinasi wisata untuk mempermudah wisatawan atau pengunjung menentukan destinasi wisata yang dikunjungi di Kabupaten Pangandaran.

Akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat Kabupaten Pangandaran belum mengetahui tentang media promosi tersebut. Hal ini peneliti temukan dari hasil wawancara bersama para informan dimana rata-rata informan belum mengetahui tentang website pangandarantourism.go.id. Selain itu, *E-Magazine* yang diciptakan dengan tujuan memudahkan wisatawan dalam menentukan destinasi wisata yang akan dikunjungi kenyataannya kurang diketahui oleh publik. Sebagian besar pengunjung lokal yang mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran mengetahui adanya destinasi tersebut dari popularitas destinasi yang sudah terkenal di Indonesia, contohnya Pantai Pangandaran. Selain itu, promosi digital yang dilaksanakan dengan tujuan memperkenalkan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran belum merata secara maksimal, terlihat dari popularitas salah satu destinasi wisata yang mendominasi kunjungan wisatawan di Kabupaten Pangandaran. Rata-rata masyarakat di luar Kabupaten Pangandaran memilih objek wisata pantai sebagai destinasi wisata tujuan. Padahal, terdapat objek wisata lain yang bisa dijadikan sebagai pilihan seperti desa wisata, cagar budaya, wisata alam, serta wisata kuliner.

Dalam upaya mempromosikan destinasi wisata lain seperti desa wisata, pemerintah Kabupaten Pangandaran ikut serta dalam ajang Trisakti Tourism Award pada Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf yang diwakili oleh Desa Wisata Selasari. Namun, hal tersebut belum mampu menarik minat para pengunjung lokal untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Popularitas dari desa wisata di Kabupaten Pangandaran belum mampu menyamai popularitas objek wisata pantai. Promosi digital destinasi wisata lain di Kabupaten Pangandaran perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan berbagai media promosi yang sementara ini baru terlaksana melalui media sosial. Selain itu, optimalisasi website yang pada dasarnya sudah memiliki konsep yang baik perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan website tersebut dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan pada laman website tersebut.

Sedangkan dalam kerjasama perjalanan, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran melangsungkan kerjasama dengan pemilik *travel* dan agen wisata. Meskipun banyak promosi mengenai pariwisata pangandaran melalui *online*, namun masih ada juga pengunjung yang mengetahui pariwisata Pangandaran dari pihak lainnya seperti sanak saudara dan hal itu sudah menjadi tradisi rutin jika tiba waktu libur berwisata ke Pangandaran. Informasi tentang destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran lebih banyak tersebar dari mulut ke mulut dan bukan melalui promosi dari pihak pemerintah Kabupaten Pangandaran.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan temuan-temuan di lapangan yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan aspek pemerintahan milik rakyat dan aspek pemerintahan mengacu pada pasar sudah diterapkan akan tetapi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Masih terdapat beberapa kendala dalam kedua aspek tersebut di antaranya ada masyarakat yang belum mengetahui tentang program pembinaan dan pelatihan objek wisata di Kabupaten Pangandaran, serta promosi wisata yang memanfaatkan digitalisasi belum terlaksana secara merata.

## SARAN

Untuk memaksimalkan penerapan kedua aspek tersebut, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran harus melakukan revitalisasi program dan pembinaan, penyuluhan serta pelatihan kepada masyarakat. Selain itu, promosi digital destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya merata karena popularitas objek wisata pantai di Kabupaten Pangandaran lebih dominan daripada objek wisata lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Mohammad. "Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management dan Governance dalam Reformasi Administrasi." *Reformasi* 5, no. 2 (2015).
- Anggara, Sahya. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Dinas Pariwisata dan kebudayaan Provinsi Jawa Barat. "Jumlah Pengunjung Ke Objek Wisata Berdasarkan Jenis Wisatawan Di Jawa Barat." Open Data Jabar, 2021.
- Hendriyani, I Gusti Ayu Dewi. "Siaran Pers: Kemenparekraf Luncurkan Kampanye Sadar Wisata dan Pengembangan Pemasaran Online di 6 Destinasi Prioritas." <https://kemenparekraf.go.id/>, 2022.
- Lustiadi, Yadi. "Aplikasi Konsep Reinventing Government, Good Governance dan New Public Service dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tenggamas Provinsi Lampung." *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2016).
- Mashuda, Ali, Taufik Ade Irawan, dan Ridha Nurul Ihsan. "Tinjauan Regulasi Tol Laut Berdasarkan Teori Reinventing Government (Sea Toll Regulation Review Based on Reinventing Government Theory)." *Rechts Vinding* 8, no. 2 (2019).
- Muftiadi, Anang. "Pengembangan Desa Wisata dan Potensinya di Kabupaten Pangandaran." *Jurnal AdBispreneur* 2, no. 2 (2017).
- Osborne, David, dan Ted Gaebler. *Mewirauahakan Birokrasi : Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- Setiono, Dedy. "Analisis Penerapan New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Balai Kesehatan/Rumah Sakit." *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi* 3, no. 2 (2019).
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Siren, dan Irwan Sinaga. "Penerapan Reinventing Government (Mewirauahakan Birokrasi) di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya." *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*

Mita Fatari Ramadhani, Faizal Pikri, Idah Wahidah : Penerapan Aspek Pemerintahan Milik Rakyat Dan Pemerintahan Mengacu Pada Pasar Dalam Konsep *Reinventing Government* Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

*Negara dan Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2017).

Wijayanto, Ismuhadi Heru, Agus Suryono, dan Sukanto. “Pengembangan Potensi Pariwisata dalam Perspektif *Reinventing Government* (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan).” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2013).